

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai salah satu dari negara yang benar – benar mengedepankan taraf Pendidikan. Hal tersebut sepadan dengan isi Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alenia ke - 4 yang menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa diartikan sebagai salah satu bentuk dari memajukan kesejahteraan umum yang juga merupakan tujuan bangsa Indonesia. Isi Undang – Undang Dasar tersebut memiliki arti yang sangat luas, bahwa bangsa Indonesia harus memperhatikan pendidikan warga negaranya serta tidak hanya mengutamakan derajat sosial dan ekonomi saja.

Pendidikan dilihat sebagai sesuatu sarana dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia. Bangsa yang berkembang merupakan bangsa yang mengedepankan pendidikan yang dapat dilihat dengan pencapaian pendidikan warga negaranya. Pendidikan dinilai sangat penting karena memberikan pengaruh yang begitu besar dalam kemajuan berbagai aspek dalam kehidupan baik dalam sosial, aspek politik, aspek budaya maupun aspek ekonomi. Pada pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah berkewajiban dalam pemenuhan hak setiap warga negaranya dalam mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia”, yang artinya pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan kesejahteraan umum. Pemerintah harus menyadari bahwa Pendidikan merupakan investasi bangsa Indonesia karena

memiliki dampak yang baik dalam upaya memberantas kemiskinan dalam program pembangunan nasional.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 dan 18 yang memuat bahwa tingkat pendidikan yang terdapat di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan yang Dasar terdiri dari SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan MTs (Madrasah Tsanawiyah) sedangkan pendidikan menengah terdiri dari SMA (Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan, dan MA (Madrasah Aliyah). Yang artinya seluruh warga Negara memiliki kewajiban menjalankan pendidikan dasar maupun pendidikan menengah oleh karena itu, pendidikan merupakan tugas bersama pemerintah serta masyarakat. SMA adalah suatu jenjang pendidikan pada pendidikan formal yang terdapat di Indonesia yang diketahui di danai oleh pemerintah dalam bentuk Dana BOS sehingga tidak diperlukan adanya dana dari Orang Tua/wali murid. Akan tetapi pada pelaksanaannya pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk membiayai seluruh biaya yang diperlukan oleh sekolah. Dengan demikian diperlukan adanya Iuran dana komite yang dikeluarkan oleh orang tua atau wali murid, dalam bentuk Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) (Yenti et al., 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2008 yang memuat tentang Pendanaan Pendidikan pada Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa anggaran pemerintah merupakan anggaran yang diterima dari pemerintah pusat, sedangkan anggaran pemerintah daerah merupakan anggaran yang diterima dari pemerintah provinsi, kota atau kabupaten, dan dana yang berasal dari masyarakat merupakan

dana partisipatif yang tidak diragukan lagi dan mengikat serta bantuan dari beberapa pihak lain yang tidak terikat. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang didanai oleh pemerintah dalam bentuk Dana BOS dan masyarakat dalam hal ini orang tua serta wali murid dalam bentuk Dana Komite (SPP) yang diterima sekolah berdasarkan hasil kesepakatan seluruh pihak terkait.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite yang menyebutkan Komite Sekolah ialah badan mandiri yang menghimpun peran masyarakat dalam peningkatan nilai, pemerataan, serta efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik dalam pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan di sekolah ataupun jalur pendidikan diluar sekolah yang salah satu dari tujuannya adalah untuk memberikan situasi serta kondisi transparan, akuntabilitas dan demokratis dalam memperoleh serta melayani pendidikan yang memiliki kualitas di satuan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite Sekolah menyebutkan bahwa Dana Komite yang dapat berupa pungutan ataupun sumbangan yang diberikan oleh orang tua/walinya berupa uang yang disepakati para pihak dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan bersama. Oleh karena itu sekolah dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba karena memiliki karakteristik dari organisasi nirlaba khususnya pendapatan yang berasal dari sumbangan (Suparno & Rahmadhani, 2020).

Berdasarkan PSAK Nomor 45 yang terdiri dari paragraf 01 sampai dengan paragraf 36 telah berubah menjadi ISAK Nomor 35, isi dari pernyataan ini memuat mengenai standar khusus untuk organisasi nirlaba. Sifat dari entitas nirlaba jauh

berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari cara dalam mendapatkan sumber daya. Sumber daya yang didapatkan dari entitas nirlaba merupakan entitas yang berasal dari pemberi sumber daya yang tidak menginginkan adanya timbal balik. Sumber daya tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh entitas nirlaba tersebut. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang mempunyai sasaran pokok serta maksud yang tidak komersial tanpa memiliki tujuan untuk mendapatkan laba. Terdapat beberapa bentuk dari organisasi nirlaba dan biasanya disebut organisasi nonprofit, diantaranya adalah sekolah milik pemerintah, organisasi sukarelawan serta tempat ibadah. Selayaknya Perusahaan, transparansi serta akuntabilitas dalam administrasi juga sangat dibutuhkan dalam entitas nirlaba. Dalam membukukan kinerja dari organisasi, transparansi serta akuntabilitas dalam organisasi sangat diharapkan agar sumber daya yang diberikan dapat digunakan dengan baik (Lasfita & Muslimin, 2020).

Di Indonesia standarisasi dalam penyajian laporan keuangan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan dikenal dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan untuk menstandarisasi metode pencatatan berbagai transaksi nirlaba, dengan adanya ISAK dan 35 yang ditetapkan oleh DSAK tersebut, sebaiknya entitas atau organisasi nirlaba menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar. Dalam ISAK dijelaskan pentingnya penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba yakni untuk mengetahui manajemen melaksanakan tanggungjawab terhadap penggunaan dana yang dipercayakan

kepada mereka serta untuk memberikan informasi terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas yang memiliki manfaat dalam pengambilan Keputusan ekonomi.(Dewi, 2021).

Pelaporan keuangan dalam pendidikan seharusnya sesuai dengan pokok – pokok akuntabilitas serta transparansi. Semua bentuk transaksi, baik berupa *input* ataupun *output*, harus dilakukan secara baik. Pelaksanaan dalam pelaporan juga harus sesuai dengan kaidah penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan di Indonesia. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan lembaga Pendidikan, dilakukan dengan mengikuti PABU (Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum) dan ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan). Khususnya ISAK nomor 35 yang merupakan pergantian dari PSAK 45 yang bersangkutan dengan penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba (Ade et al., 2022).

Laporan keuangan pada organisasi nirlaba berbeda dengan laporan keuangan organisasi bisnis pada umumnya, salah satu perbedaan tersebut terlihat dari bentuk laporan keuangan. Akan tetapi tidak begitu banyak yang mengetahui bahwa seperti apa bentuk laporan keuangan organisasi nirlaba seperti sekolah atau organisasi nonprofit lainnya. Banyak yang berpikiran bahwa laporan keuangan di semua organisasi baik organisasi nirlaba maupun organisasi laba memiliki kesamaan baik bentuk ataupun proses pencatatannya (Ansari, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasfita dan Muslimin (2020) menunjukkan bahwa masjid Al – Mabur Surabaya belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan Isak No.35 karena dalam proses penyusunan laporan keuangan semula berpedoman pada laporan keuangan masjid pada umumnya yakni

hanya mencatat kas masuk dan kas keluar, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade, R., F dan Saputra (2022) menunjukkan bahwa proses akuntansi yang dilakukan oleh madrasah kota Pekanbaru belum sesuai dengan ISAK No.35

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara antara penulis dengan beberapa pihak di sekolah ditemukan bahwa SMA Negeri 1 Halmahera Selatan terdapat beberapa permasalahan baik dalam proses pengumpulan dana komite, pengelolaan, serta pelaporan dana komite sekolah yang pembukuannya belum sesuai dengan ISAK nomor 35 dan hanya berupa catatan keuangan terhadap kas yang masuk serta kas keluar yang tidak berbentuk laporan keuangan. Kas harian dibuat menggunakan pencatatan *single entry* sehingga pelaporan yang dilakukan hanya berupa penyampaian keuangan kepada pihak terkait baik dewan guru maupun orang tua dalam bentuk rapat akan tetapi beberapa tahun belakang pelaporan dalam rapat tersebut sudah tidak terlaksana, dikarenakan beberapa faktor salah satunya kurangnya pemahaman dalam pembukuan laporan keuangan. SMA Negeri 1 Halmahera Selatan menerima dana sumbangan dalam bentuk SPP dari Siswa yang dibayarkan sejak tercatat sebagai siswa di SMA Negeri 1 Halmahera Selatan yang digunakan oleh sekolah untuk menunjang kegiatan di sekolah serta membayar insentif guru, membayar gaji guru honorer provinsi. Untuk itu perlu adanya pelaporan keuangan yang jelas dan harus diketahui oleh orang tua siswa.

Dari penjelasan diatas, maka penulis ingin mengetahui seperti apa proses dalam penyusunan laporan sekolah yang sesuai dengan ISAK No.35 di SMA Negeri 1 Halmahera Selatan, peneliti memilih Objek dalam penelitian yaitu SMA Negeri 1 Halmahera Selatan. Alasan peneliti memilih objek pada SMA ini karena SMA N 1

Halmahera selatan merupakan jenjang Pendidikan Menengah Atas yang berada di Provinsi Maluku Utara khususnya di kabupaten Halmahera Selatan yang juga merupakan sekolah yang memiliki kegiatan yang lebih objektif, dan merupakan salah satu sekolah favorite di Halmahera selatan dengan peminat siswa baru terbanyak. SMA Negeri 1 Halmahera Selatan dikenal sebagai sekolah yang memiliki berbagai macam prestasi baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik, terlibat di dalam seluruh kegiatan sekolah. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti SMA Negeri 1 Halmahera Selatan yang diharapkan menjadi contoh bagi sekolah menengah atas lainnya yang berada di kabupaten Halmahera selatan.

Atas dasar dari beberapa fenomena diatas, peneliti tertarik untuk membuat proposal skripsi dengan judul **ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEKOLAH YANG BERDASARKAN ISAK NOMOR 35 (Studi Kasus SMA Negeri 1 Halmahera Selatan).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan sekolah pada SMA Negeri 1 Halmahera Selatan?
2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan sekolah berdasarkan ISAK No.35?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ialah pada permasalahan penelitian : yaitu mengoptimalkan penyusunan laporan keuangan sekolah yang sesuai dengan ISAK No. 35 untuk mengembangkan dan mempengaruhi perkembangan serta keberlangsungan pengelolaan laporan keuangan di SMA Negeri 1 Halmahera Selatan sekaligus untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan sekolah berdasarkan pada ISAK No.35.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mendeskripsikan penyusun laporan keuangan sekolah pada SMA Negeri 1 Halmahera Selatan.
2. Mendeskripsikan penyusun laporan keuangan sekolah yang sesuai dengan ISAK No. 35.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini ialah implikasi dari teori serta materi yang didapatkan selama menjalani perkuliahan. Penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai pendukung teoritis atau dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan sekolah sesuai ISAK No. 35 pada SMA Negeri 1 Halmahera Selatan.

1.5.2 Manfaat Peneliti

a. Bagi Peneliti

Untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian sebagai tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami ISAK 35 bila dipraktekan serta mekanisme pelaporan keuangan nirlaba yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

b. Bagi SMA Negeri 1 Halmahera Selatan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi SMA Negeri 1 Halmahera Selatan dalam menyajikan laporan keuangan sekolah sesuai dengan ISAK No. 35 sehingga dapat berkelanjutan pada periode pelaporan berikutnya.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menjadi referensi bagi para pembaca dan mampu menambah ilmu pengetahuan serta informasi mengenai penyusunan laporan keuangan sekolah yang sesuai dengan ISAK No. 35 serta bagi para pembaca yang tertarik menjadi peneliti selanjutnya.